

Laporan Perkembangan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)



DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.....	1
2. RINGKASAN EKSEKUTIF	2
3. BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI.....	4
3.1. Perkembangan Ekonomi Terkini	4
3.2. Perkembangan Digitalisasi Pembayaran	6
3.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
4. BAB II PERKEMBANGAN ETPD NASIONAL	10
4.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD Nasional.....	10
4.2. Perkembangan Indeks ETPD – Nasional.....	11
4.3. Implementasi ETPD Semester II Tahun 2021	12
5. BAB III PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA REGIONAL.....	16
5.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD di Daerah (Per Tingkat Pemerintah Daerah).....	16
5.2. Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	17
5.3. Implementasi IETPD Semester II Tahun 2021	19
5.4. Implementasi ETP Berdasarkan Regional	24
5.4.1. Sumatera	24
5.4.2. Jawa	25
5.4.3. Kalimantan	26
5.4.4. Balinusra.....	28
5.4.5. Sulampua	29
6. BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI	31
6.1. Kendala Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ..	31
6.2. Rekomendasi Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	33

1. KATA PENGANTAR

Perekonomian global menuju pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Meski pandemi Covid-19 kembali mengancam dengan munculnya varian delta pada awal 2021, akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas masyarakat turut berdampak pada tingkat perbaikan ekonomi global maupun nasional. Realisasi PAD pada tahun 2021 meningkat 12,13% dibandingkan realisasi PAD tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp296 triliun. Upaya mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kontributor utama dalam PAD ditengah menurunnya perekonomian secara nasional.

Dalam upaya mendorong ETPD, pada tanggal 4 Maret 2021 telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 terkait Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di daerah. Koordinasi yang baik antara Satgas P2DD dan TP2DD diperlukan untuk menghasilkan program kerja yang efektif dalam mendorong ETPD. Berdasarkan laporan implementasi ETPD yang disampaikan TP2DD, Satgas P2DD menyusun Laporan Perkembangan Implementasi ETPD secara berkala. Penyusunan laporan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkembangan elektronifikasi pada berbagai transaksi belanja dan pendapatan melalui berbagai kanal pembayaran, penggunaan dan integrasi sistem informasi keuangan di daerah serta aspek lingkungan strategis yang mampu mendorong ETPD. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam penyampaian data implementasi ETPD dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan laporan asesmen ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam menyusun berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong ETPD.

2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Momentum perbaikan ekonomi nasional berlanjut pada 2022. Pada triwulan IV 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Perbaikan terjadi di hampir seluruh komponen PDB sisi pengeluaran maupun lapangan usaha, sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi tumbuh 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07% (yoy).

Meningkatnya perekonomian nasional pada triwulan IV 2021 mendorong perbaikan pertumbuhan penerimaan daerah. Realisasi PAD pada tahun 2021 meningkat 12,13% dibandingkan realisasi PAD tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp296 triliun. Realisasi PAD tahun 2021 mencapai 95,4% dari target anggaran yang direncanakan, meningkat dibandingkan capaian 2020 sebesar 80,4% target. Perbaikan realisasi pendapatan daerah ini terutama bersumber dari capaian realisasi pajak daerah. Realisasi pajak daerah pada tahun 2021 mencapai Rp192,2 triliun atau meningkat 7,22% dibanding tahun 2020. Di sisi lain, retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami kontraksi 5,79% (yoy) dengan nilai realisasi sebesar Rp7,9 triliun.

Implementasi ETPD meningkat didorong penguatan kelembagaan pasca diterbitkan Keppres No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). *Awareness* pemerintah daerah untuk mendorong ETPD meningkat tercermin dari meningkatnya jumlah TP2DD yang telah terbentuk. Hingga Desember 2021 pembentukan TP2DD telah mencapai 542 pemerintah daerah yang terdiri atas 34 provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten. Untuk mendorong pelaporan ETPD oleh Pemda, Ketua Sekertariat Satgas P2DD (Kemenko Perekonomian) telah menyampaikan surat kepada seluruh TP2DD yang meminta Pemda melakukan pelaporan data ETPD melalui SIP2DD. Surat tersebut juga telah disebarluaskan oleh Kemendagri kepada seluruh Pemda melalui *radiogram*.

Hasil pemetaan Indeks ETPD menunjukkan 191 Pemda telah berada pada tahap Digital, 236 Pemda berada pada tahap Maju, 101 Pemda berada pada tahap Berkembang dan 14 Pemda berada pada tahap Inisiasi. Capaian dimaksud didorong oleh elektronifikasi di berbagai transaksi pendapatan dan belanja serta penggunaan sistem informasi seperti elektronifikasi transaksi pajak sebesar 87,1%, retribusi 59,7%, Belanja Langsung 93,6% dan Belanja Tidak Langsung 91,6% dari total jenis transaksi pendapatan/belanja yang dipungut atau dianggarkan. Penggunaan kanal pembayaran digital seperti penggunaan QRIS telah diimplementasikan di 243 Pemda, *Internet/Mobile/SMS Banking* di 407 Pemda dan *e-commerce* di 233 Pemda.

Pemanfaatan sistem informasi keuangan seperti SP2D *Online* telah diimplementasikan oleh 377 Pemda atau 69,6% dari total 542 Pemda, dan *Cash Management System* (CMS) telah diimplementasikan di 437 Pemda atau 80,6% dari total 542 Pemda.

Ke depan, implementasi ETPD akan terus didorong antara lain melalui perluasan penggunaan kanal pembayaran digital, termasuk mendorong kesiapan BPD untuk bekerjasama dengan bank lain/PJP atau platform digital/*e-commerce*. Di sisi masyarakat, perlu adanya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan literasi dan minat masyarakat untuk bertransaksi nontunai menggunakan kanal digital. Selain itu, peningkatan partisipasi dan keakurasian pelaporan implementasi ETPD dalam SIP2DD juga perlu dilakukan untuk mendukung asesmen implementasi ETPD yang lebih *robust*.

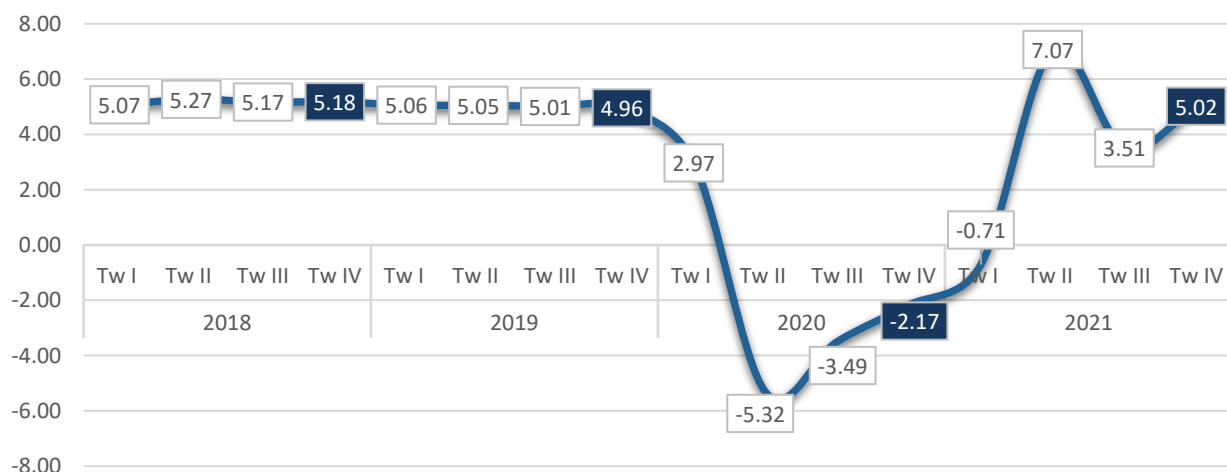
3. BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI

3.1. Perkembangan Ekonomi Terkini

Perekonomian global menuju pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Meski pandemi Covid-19 kembali mengancam dengan munculnya varian delta pada awal 2021, akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas masyarakat berkontribusi pada perbaikan ekonomi global maupun nasional. Perbaikan ekonomi global dapat dilihat dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat di dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia (yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat) dan didukung oleh stimulus fiskal dan moneter yang kuat melalui pelaksanaan program vaksinasi, bantuan sosial dan dunia usaha serta penambahan likuiditas ke sistem keuangan. Ekonomi Tiongkok tumbuh 8,1% (yoy) pada tahun 2021 setelah mencatat pertumbuhan 2,3% (yoy) pada tahun 2020. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 6,9% (yoy), setelah mengalami kontraksi 3,4% (yoy) pada tahun 2020.

Ekonomi nasional juga menunjukkan perbaikan sejak triwulan II 2020 dan semakin membaik pada triwulan IV 2021. Penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah melalui percepatan program vaksinasi dan pengetatan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kawasan Jawa-Bali selama puncak penyebaran varian Delta, telah mendorong pengendalian kasus Covid-19 sehingga jumlah kasus positif menurun dan PPKM dibuka secara bertahap. Grafik 1.1 menunjukkan kinerja perekonomian tumbuh positif sejak triwulan II 2021, yaitu sebesar 7,07% (yoy). Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pada triwulan III, kinerja ekonomi tumbuh positif 1,51% (qtq) pada triwulan IV menjadi 5,02%

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia (% , yoy)



Sumber: BPS, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV ditopang oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh 29,83% (yoy) dan impor barang dan jasa yang tumbuh 29,60% (yoy). Selain itu konsumsi pemerintah pada Q4 juga terpantau tumbuh sebagai dampak pemberian stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

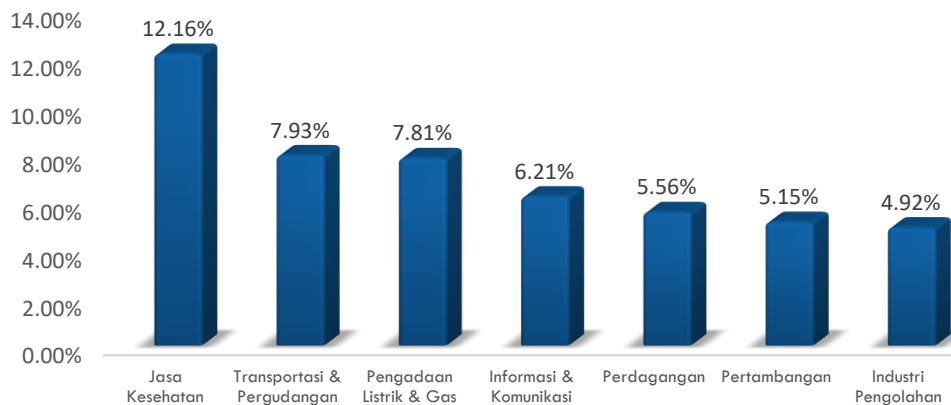
Tabel 1.1 Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen	2020		2021	
	TW III	TW IV	TW III	TW IV
PDB	-3,49	-2,19	3,51	5,02
Konsumsi Rumah Tangga	-4,05	-3,61	1,02	3,55
PMTB		-6,71	3,76	4,49
Ekspor	-11,66	-6,89	29,16	29,83
Impor	-23	-15,83	29,95	29,6
Konsumsi Pemerintah	9,76	1,79	0,62	5,25

Sumber: BPS, 2021

Secara sektoral, sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 ditopang oleh Jasa Kesehatan, Transportasi Pergudangan, Pengadaan Listrik Gas, Informasi Komunikasi, Perdagangan, Pertambangan dan Industri Pengolahan. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 12,16% (Grafik 1.2). Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan kegiatan jasa kesehatan akibat peningkatan jumlah pasien dan uji spesimen Covid-19, dan Kenaikan insentif Kesehatan terkait perawatan pasien Covid-19.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyumbang Kinerja Ekonomi Triwulan IV - 2021 (% , yoy)



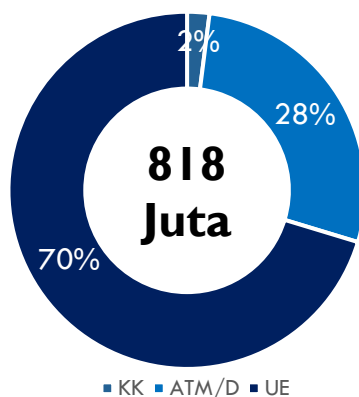
Sumber: BPS, 2021

Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2021 dan secara keseluruhan pada tahun 2021 membaik dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi 2,07% (yoy). Perbaikan kinerja didorong oleh pelonggaran mobilitas yang sejalan dengan perkembangan capaian vaksinasi, kinerja ekspor yang tetap kuat serta stimulus kebijakan yang terus berlanjut. Pada tahun 2021 pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memfokuskan pada upaya mendorong perluasan vaksinasi Covid-19, insentif fiskal, serta mendorong realisasi bantuan sosial untuk mendorong konsumsi masyarakat. Insentif fiskal melalui keringanan pajak dan retribusi serta penghapusan sanksi administrasi dalam keterlambatan pembayaran cukup efektif mendorong realisasi konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan 2021, Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan berada dalam rentang 3,2% – 4,0% (yoy). Sementara pada tahun 2022, kinerja ekonomi diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada rentang 4,7% - 5,5% (yoy).

3.2. Perkembangan Digitalisasi Pembayaran

Meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring serta perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital turut mendorong pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Percepatan digitalisasi sistem pembayaran telah mendorong akselerasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Perkembangan instrumen nontunai yang beredar, terutama uang elektronik menunjukkan peningkatan yang tinggi pada akhir periode 2021. Jumlah instrumen nontunai beredar pada periode November mencapai 818 juta instrumen, yang mencakup uang elektronik, kartu ATM/debit dan kartu kredit (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Jumlah Instrumen Nontunai Beredar November 2021



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Instrumen Nontunai Beredar November 2021

2021	UANG ELEKTRONIK	ATM/DEBIT	KARTU KREDIT
	Nominal Rp.305,4 Triliun	Nominal Rp.7.677,2 Triliun	Nominal Rp.244,5 Triliun
Growth (yoy)	49,06%	10,99%	2,35%

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Secara nominal, transaksi instrumen nontunai sepanjang 2021 mencapai Rp 8.227 triliun, dengan nominal transaksi terbesar didominasi kartu ATM/Debit. Instrumen pembayaran kartu ATM/debit sepanjang 2021 mencatat pertumbuhan 10.99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara nominal transaksi uang

elektronik tumbuh hingga 49,06% (yoy). Nominal kartu kredit mencatat kenaikan sebesar 2.35% (yoy) (Gambar 1.1).

Tren kenaikan transaksi *digital banking* juga mengalami peningkatan, baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Secara keseluruhan tahun 2021 volume transaksi digital banking yang mencakup *phone banking*, *sms/mobile banking* dan *internet banking* mencapai 6,96 miliar transaksi. Volume transaksi tersebut tumbuh 40,31% dibandingkan tahun 2020, dengan peningkatan volume pada transaksi *sms/mobile banking* dan *internet banking*. Sementara itu, nominal transaksi *digital banking* tumbuh 22,74% dibanding tahun 2020. Tren kenaikan transaksi *digital banking* menunjukkan bahwa akseptasi masyarakat terhadap pembayaran secara *digital* mulai meningkat.

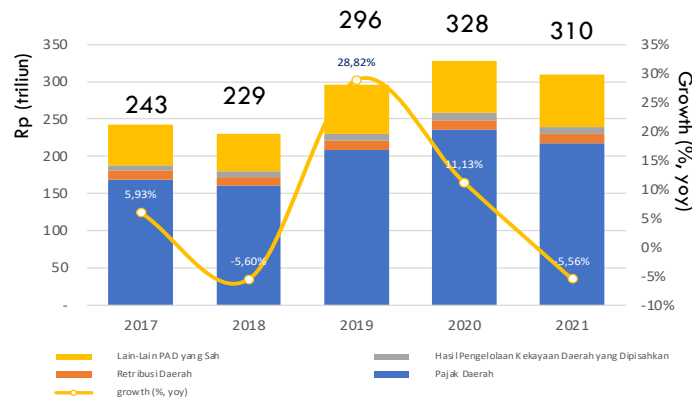
Tingginya akseptasi masyarakat juga tercermin dari perkembangan transaksi QRIS. Volume transaksi QRIS pada triwulan IV 2021 tumbuh hingga 236% (yoy) dan mencapai 143,2 juta transaksi. Sementara dari sisi nominal, transaksi melalui kanal QRIS tumbuh 269% (yoy) dengan nominal Rp11,1 triliun pada triwulan IV 2021. Perluasan QRIS yang ditempuh melalui kampanye masif terus dilakukan untuk mencapai target penggunaan QRIS di 12 juta *merchant* pada tahun 2021. Selain itu sinergi dengan Pemerintah bersama Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus didorong untuk meningkatkan penggunaan QRIS dalam transaksi pendapatan pemerintah.

Berbagai perkembangan transaksi pembayaran nontunai dan digital tidak hanya mencerminkan akseptasi masyarakat, namun menjadi peluang untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembatasan mobilitas masyarakat pada masa pandemi serta besarnya target anggaran PAD yang dikelola Pemerintah Daerah berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pencapaian target PAD akibat adanya kendala pembayaran bagi masyarakat. Oleh karena itu, elektronifikasi dan pemanfaatan kanal pembayaran digital dapat menjadi peluang untuk mendorong optimalisasi PAD melalui kemudahan pembayaran yang diberikan kepada masyarakat.

3.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kondisi pandemi Covid-19 dan tidak optimalnya capaian realisasi penerimaan daerah pada tahun 2020 menyebabkan Pemerintah Daerah menurunkan target anggaran penerimaan pada tahun 2021. Pembatasan aktivitas sosial, menurunnya usaha dan transaksi kena pajak, serta sejumlah insentif perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah telah mengurangi potensi penerimaan daerah pada tahun 2020. Dari sisi target anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2021 mengalami penurunan 5,6% menjadi Rp310,17 triliun (Grafik 1.4). Target PAD yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah juga mencatat penurunan masing-masing sebesar 7,6% dan 6,6% dibanding rencana 2020. Penurunan anggaran pada tahun 2021 juga sejalan dengan tidak optimalnya realisasi PAD pada tahun 2020 yang hanya mencapai 80,4% dari target sebesar Rp328,42 triliun.

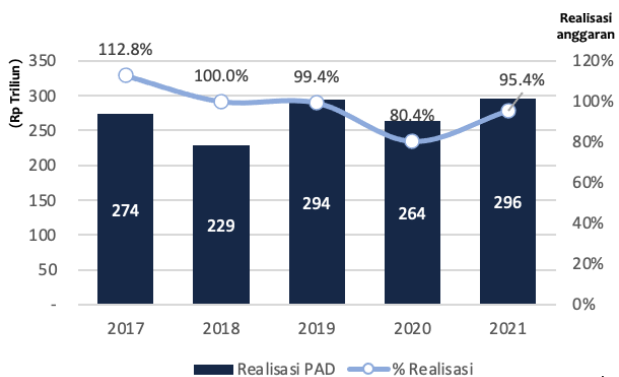
Grafik 1.4. Anggaran PAD Tahun 2021 (data sementara)



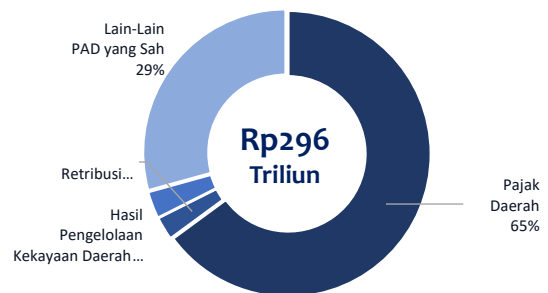
Sumber: DJPK, 2021

Meski demikian, perbaikan kinerja ekonomi nasional pada tahun 2021 turut mendorong perbaikan pertumbuhan penerimaan daerah. Realisasi PAD pada tahun 2021 meningkat 12,13% dibandingkan realisasi PAD tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp296 triliun (Grafik 1.5.). Realisasi PAD tahun 2021 mencapai 95,4% dari target anggaran yang direncanakan, meningkat dibandingkan capaian 2020 sebesar 80,4% target. Kondisi ini juga mengkonfirmasi arah pemulihan ekonomi nasional setelah pada tahun 2020 realisasi PAD mencatat kontraksi sebesar 10,10% (yoy) seiring dengan menurunnya realisasi pajak daerah.

Grafik 1.5. Realisasi PAD Tahun 2021



Grafik 1.6. Komposisi PAD Tahun 2021

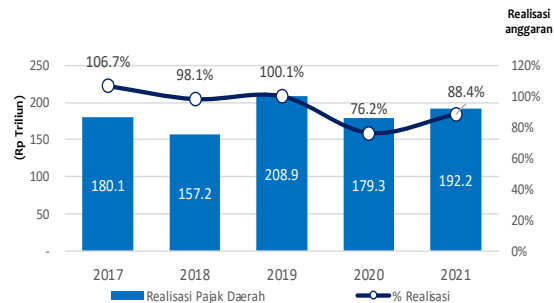


Sumber: DJPK, 2021

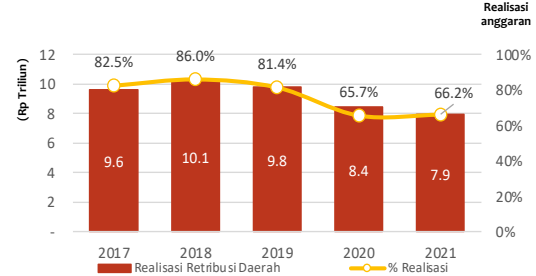
Perbaikan realisasi pendapatan daerah ini terutama bersumber dari capaian realisasi pajak daerah. Pendapatan dari pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam komponen realisasi PAD (Grafik 1.6.). Realisasi pajak daerah pada tahun 2021

mencapai Rp192,2 triliun atau meningkat 7,22% dibanding tahun 2020 (Grafik 1.7.). Realisasi tersebut mencapai 88,4% dari target pajak daerah yang dianggarkan sebesar Rp217,5 triliun. Capaian realisasi pajak daerah pada tahun 2021 juga lebih tinggi dibandingkan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang hanya mencapai 76,2% dari target.

Grafik 1.7. Realisasi Pajak Daerah (Rp triliun)



Grafik 1.8. Realisasi Retribusi Daerah (Rp triliun)



Sumber: DJPK, 2021

Di samping perbaikan ekonomi, berbagai kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemerintah Daerah turut mendorong peningkatan realisasi pajak daerah. Beberapa relaksasi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah antara lain diberikan dalam bentuk pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif atas piutang pajak daerah serta pemberian penghapusan sanksi administratif untuk pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak daerah lainnya. Relaksasi yang dikeluarkan berbagai Pemerintah Daerah tersebut tidak hanya meringankan beban finansial bagi masyarakat, namun mendorong masyarakat memanfaatkan stimulus yang diberikan hingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah di masa pandemi Covid-19.

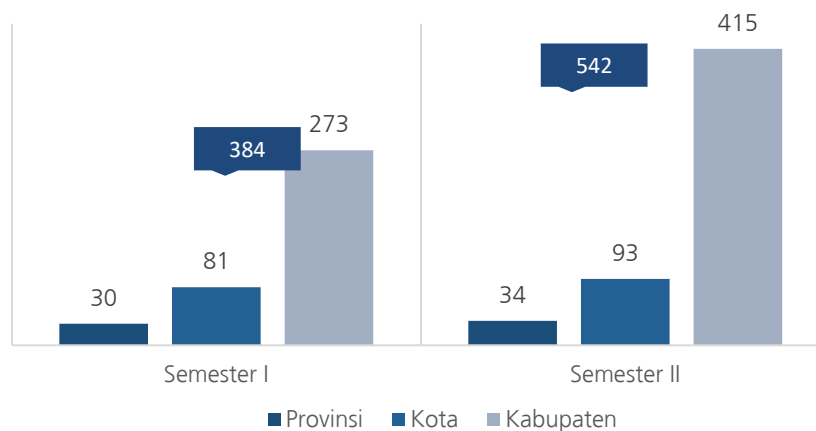
Di sisi lain, pendapatan daerah dari retribusi masih menunjukkan penurunan capaian realisasi. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami kontraksi 5,79% (yoy) dengan nilai realisasi sebesar Rp7,9 triliun (Grafik 1.8.). Kondisi kontraksi ini telah diperkirakan sebelumnya, sejalan dengan penyesuaian ditargetkan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp11,98 triliun atau turun 6,56% dibanding target anggaran retribusi daerah pada tahun 2020. Dari anggaran 2021 tersebut, realisasi retribusi daerah hanya mencapai 66,19% target. Meski demikian, kondisi kontraksi realisasi retribusi daerah tidak sedalam penurunan retribusi pada tahun 2020 yang tercatat mengalami kontraksi hingga 14,02% (yoy), dengan capaian realisasi Rp8,4 triliun.

4. BAB II PERKEMBANGAN ETPD NASIONAL

4.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD Nasional

Sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, pembentukan TP2DD terus mengalami peningkatan. Pada semester II 2021, TP2DD telah terbentuk di 542 pemerintah daerah atau 100% dari total seluruh pemerintah daerah. Dengan demikian, saat ini telah terbentuk 34 TP2DD di tingkat provinsi, 93 TP2DD di tingkat kota, dan 415 TP2DD di tingkat kabupaten.

Grafik 2.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD



Sumber: Bank Indonesia

Akselerasi pembentukan TP2DD tersebut juga didukung oleh Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda antara Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu dan Kominfo pada 13 Februari 2020 sebagai cikal bakal TP2DD. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2021 tanggal 5 November 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tata kelola keuangan terintegrasi. Tugas TP2DD, yaitu menyusun peta jalan dan rencana aksi, melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD, melaksanakan ETPD, melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD, melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD, dan melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.

Gambar 2.1. Penandatanganan Nota Kesepahaman ETP



Sumber: Bank Indonesia

4.2. Perkembangan Indeks ETPD - Nasional

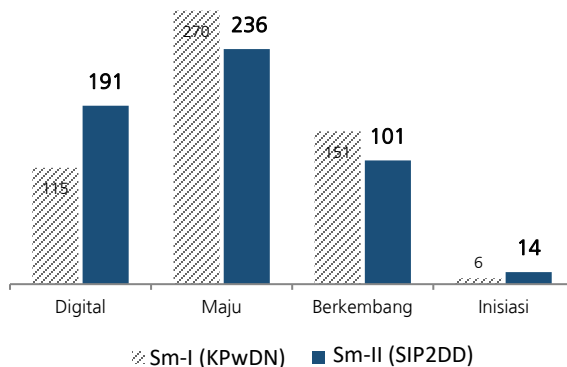
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada semester II 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks ETPD¹, jumlah pemerintah daerah yang berada di Tahap Digital mencapai 191 pemerintah daerah, meningkat dibanding semester I sebanyak 115 pemerintah daerah. Sementara itu jumlah pemerintah daerah di Tahap Maju sebesar 236 pemerintah daerah dan pada tahap Berkembang menjadi 101 pemerintah daerah, dan di Tahap Inisiasi sebesar 14 pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pemerintah daerah yang berada di Tahap Digital sebanyak 191 pemerintah daerah atau 35,2% dari total 542 pemerintah daerah, yang terdiri dari 16 Provinsi, 49 Kota, dan 126 Kabupaten.
- Pemerintah daerah yang berada di Tahap Maju sebanyak 236 pemerintah daerah atau 43,5% dari total 542 Pemerintah daerah, yang terdiri dari 17 Provinsi, 35 Kota, dan 184 Kabupaten.
- Pemerintah daerah yang berada di Tahap Berkembang sebanyak 101 pemerintah daerah atau 18,6% dari total 542 Pemerintah daerah, yang terdiri dari 1 Provinsi, 8 Kota, dan 92 Kabupaten.

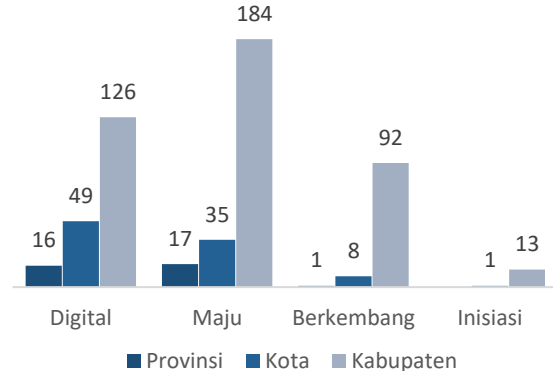
¹ Indeks ETPD merupakan metodologi pengukuran yang digunakan untuk memetakan, memonitor perkembangan, dan mengukur elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di suatu daerah relatif dengan daerah lain melalui penilaian aspek implementasi, aspek realisasi serta aspek lingkungan strategis

- d. Pemerintah daerah yang berada di Tahap Inisiasi sebanyak 14 pemerintah daerah tingkat kabupaten atau 2,6% dari total 542 Pemerintah daerah, yang terdiri dari 1 Kota dan 13 Kabupaten.

Grafik 2.2. Tahapan Elektronifikasi Pemerintah daerah



Grafik 2.3. Capaian Implementasi ETPD per Tingkat Pemda



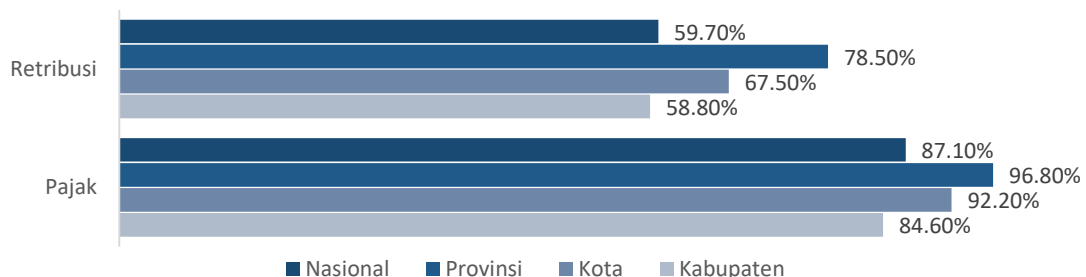
Sumber: Bank Indonesia

4.3. Implementasi ETPD Semester II Tahun 2021 - Nasional

Berdasarkan data pelaporan ETPD, **elektronifikasi transaksi pembayaran pajak** pada semester II 2021 secara nasional mencapai 87,1% dari total pajak yang dipungut. Sementara, elektronifikasi transaksi pajak pada pemerintah daerah di tingkat provinsi memiliki capaian tertinggi sebesar 96,8%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 92,2% dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 84,6% dari total pajak yang dipungut (Grafik 2.4).

Selanjutnya, capaian **elektronifikasi transaksi pembayaran retribusi** secara nasional pada semester II 2021 sebesar 59,7% dari total retribusi yang dipungut. Capaian elektronifikasi transaksi pembayaran retribusi tertinggi terdapat pada pemerintah daerah di tingkat provinsi sebesar 78,5%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 67,5% dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 58,8% dari total retribusi yang dipungut (Grafik 2.4).

Grafik 2.4 – Elektronifikasi Pajak dan Retribusi Tahun 2021

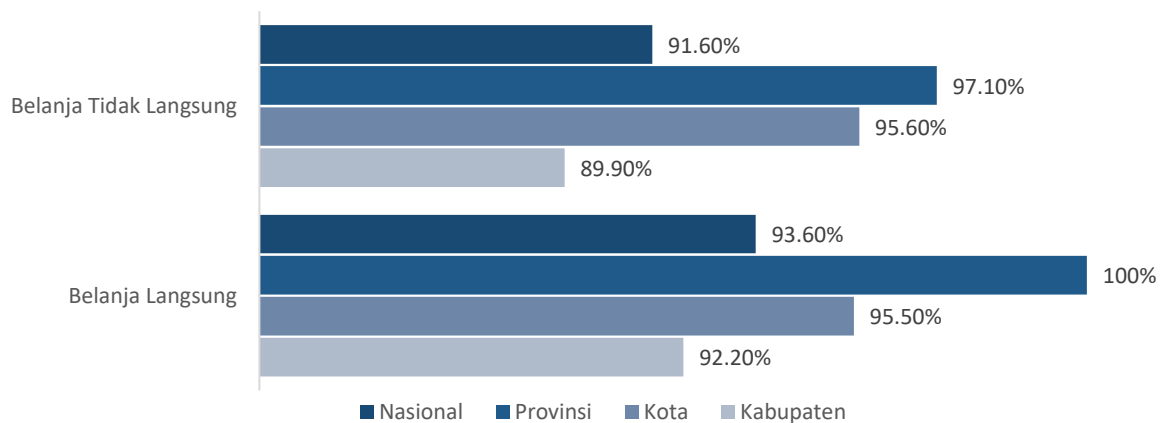


Sumber: Bank Indonesia, 2021

Pada semester II 2021, **capaian elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung** secara nasional sebesar 91,6% dari total belanja tidak langsung yang dianggarkan. Sementara, capaian elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung pemerintah daerah di tingkat provinsi sebesar 97,1%, pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 95,6% dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 89,9% dari total belanja tidak langsung yang dianggarkan.

Di sisi lain, **elektronifikasi transaksi belanja langsung** pada semester II 2021 secara nasional tercatat telah mencapai 93,6% dari total belanja langsung yang dianggarkan. Capaian elektronifikasi transaksi belanja langsung tertinggi terdapat pada pemerintah daerah di tingkat provinsi yang telah mencapai 100%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 95,5%, dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 92,2% dari total belanja langsung yang dianggarkan (Grafik 2.5).

Grafik 2.5. – Elektronifikasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2021



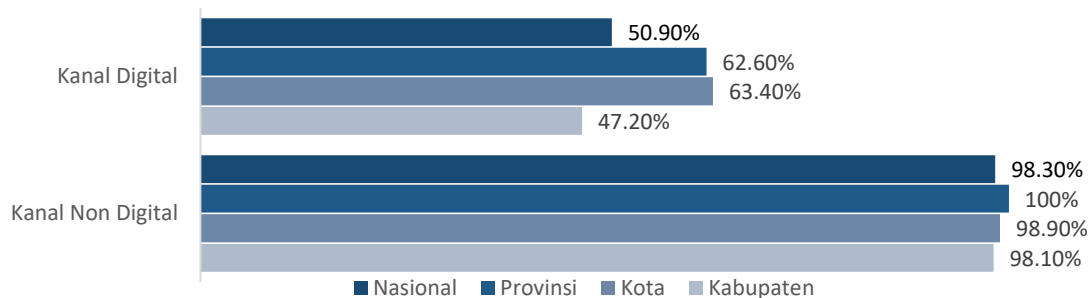
Sumber: Bank Indonesia, 2021

Kanal pembayaran non digital (loket bank atau *teller*) untuk transaksi pajak dan retribusi secara nasional pada semester II 2021 telah digunakan oleh 533 pemerintah daerah atau 98,3% dari total 542 pemerintah daerah. Dengan demikian, hampir seluruh pemerintah daerah telah memanfaatkan layanan *teller* atau loket bank untuk pembayaran pajak dan retribusi. Penggunaan kanal pembayaran non digital tertinggi terdapat pada pemerintah daerah di tingkat provinsi sebesar 100%, sedangkan pemerintah daerah di tingkat kota sebesar 98,9%, dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten sebesar 98,1% (Grafik 2.6).

Pada grafik 2.6, juga ditunjukkan **capaian penggunaan kanal digital** berupa ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, Agen Bank, *UE Reader*, *e-commerce* dan QRIS oleh pemerintah daerah secara nasional telah mencapai 50,9% pada semester II 2021. Pemerintah daerah tingkat kota memiliki capaian penggunaan kanal digital tertinggi sebesar 63,4%, disusul oleh pemerintah daerah tingkat provinsi sebesar 62,2%, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten sebesar 47,2%.

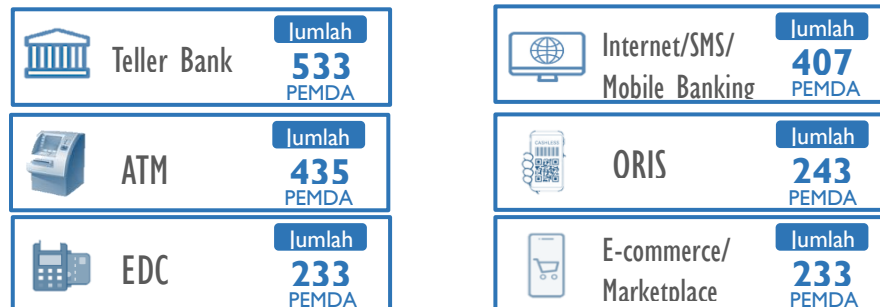
Selanjutnya, kanal pembayaran digital yang paling banyak digunakan oleh pemerintah daerah adalah mesin ATM sebanyak 435 pemerintah daerah, *Internet/Mobile/SMS Banking* sebanyak 407 pemerintah daerah, QRIS sebanyak 243 pemerintah daerah, serta mesin EDC dan transaksi melalui platform online/*e-commerce* sebanyak 233 pemerintah daerah. Capaian tersebut menunjukkan penggunaan kanal pembayaran digital, terutama mesin EDC, QRIS, dan *e-commerce* masih perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi penerimaan PAD (Gambar 2.7).

Grafik 2.6. – Penggunaan Kanal Digital dan NonDigital Tahun 2021



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Gambar 2.7. – Pemanfaatan Kanal Pembayaran



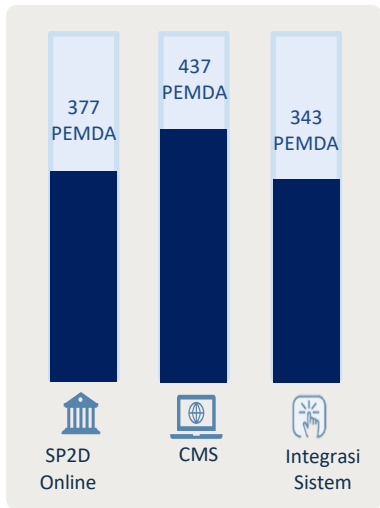
Sumber: Bank Indonesia, 2021

Penggunaan **SP2D online** secara nasional telah dilakukan oleh 377 pemerintah daerah atau 69,6% dari total 542 Pemerintah daerah pada semester II 2021 (Gambar 2.3). Pemanfaatan **SP2D online** pada pemerintah daerah tingkat provinsi telah mencapai 88,2%, pada tingkat kota sebesar 77,4% dan pada tingkat kabupaten mencapai 66,3% (Grafik 2.7).

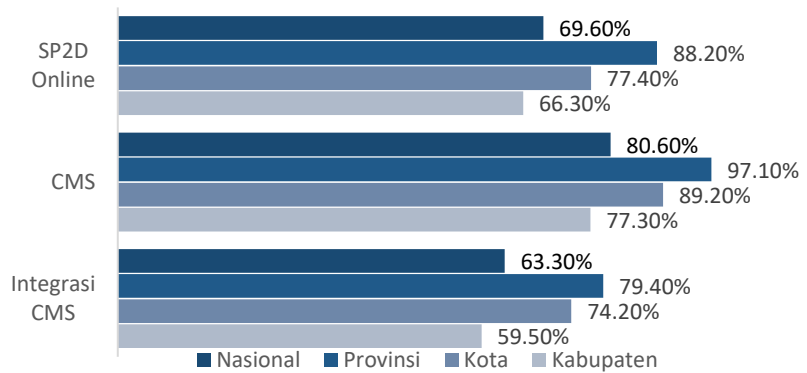
Sementara, **Cash Management System (CMS)** secara nasional telah diimplementasikan di 437 pemerintah daerah atau 80,6% dari total 542 Pemerintah daerah pada semester II 2021 (Gambar 2.3). Penggunaan CMS pada tingkat pemerintah tingkat provinsi telah mencapai 97,1%, pada tingkat Kota 89,2% dan pada tingkat Kabupaten 77,3% (Grafik 2.7).

Integrasi antara *Cash Management System* (CMS) dan sistem keuangan pemda secara nasional telah mencapai 343 pemerintah daerah atau 63,3% dari total 542 pemerintah daerah pada semester II 2021 (Gambar 2.3). Integrasi CMS dan sistem keuangan pemda pada pemerintah daerah tingkat provinsi telah mencapai 79,4%, pada tingkat Kota 74,2% dan pada tingkat Kabupaten 59,5% (Grafik 2.7).

Gambar 2.3. Penggunaan Sistem Infomasi 2021



Grafik 2.7. Penggunaan Sistem Infomasi 2021



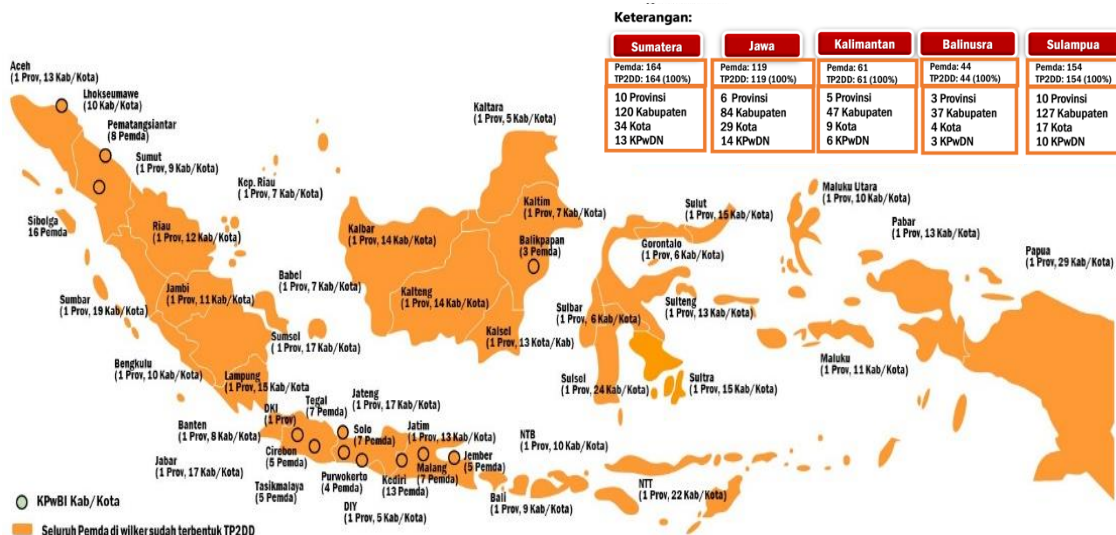
Sumber: Bank Indonesia, 2021

5. BAB III PERKEMBANGAN ETPD REGIONAL

5.1. Perkembangan Pembentukan TP2DD di Daerah (Per Tingkat Pemerintah Daerah)

Pada semester II 2021, seluruh wilayah telah membentuk TP2DD yang terdiri atas wilayah Sumatera sebanyak 164 pemerintah daerah (10 tingkat provinsi, 120 tingkat kabupaten dan 34 tingkat kota), wilayah Jawa sebanyak 119 pemerintah daerah (6 tingkat provinsi, 84 tingkat kabupaten dan 29 tingkat kota), wilayah Kalimantan sebanyak 61 pemerintah daerah (5 tingkat provinsi, 47 tingkat kabupaten dan 9 tingkat kota), wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) sebanyak 44 pemerintah daerah (3 tingkat provinsi, 37 tingkat kabupaten dan 4 tingkat kota), dan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) sebanyak 154 pemerintah daerah (10 tingkat provinsi, 127 tingkat kabupaten dan 17 tingkat kota) (Gambar 3.1).

Gambar 3.1. Peta Pembentukan TP2DD



Sumber: Bank Indonesia

Salah satu kunci keberhasilan pembentukan TP2DD di daerah yaitu dengan terbentuknya Keppres No.3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 serta komunikasi yang efektif salah satunya melalui penyelenggaraan *event* Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tahun 2021 dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia” yang dilakukan pada 5-8 April 2021 yang melibatkan Satgas P2DD dan K/L lainnya, pemerintah daerah, asosiasi, maupun industri jasa keuangan.

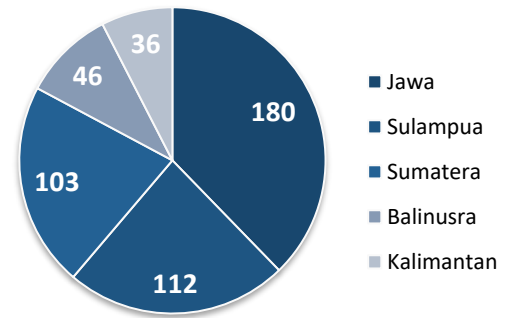
Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga melakukan kegiatan yang sama sebagai salah satu dukungan FEKDI Pusat, sebanyak 477 *event* yang dilakukan di 34

Provinsi sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat dalam hal digitalisasi maupun *event* strategis antara lain *High Level Meeting* (HLM) yang dilakukan daerah dalam hal pembentukan TP2DD. Jawa menjadi wilayah terbanyak yang melakukan *event* dengan total 180 *event*, Sulampua 112 *event*, Sumatera 103 *event*, Balinusra 46 *event* dan Kalimantan 36 *event* (Grafik 3.1).

Gambar 3.2. Pelaksanaan FEKDI Tahun 2021



Grafik 3.1. Pelaksana *Event* Pendukung FEKDI di Daerah



Sumber: Bank Indonesia

5.2. Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

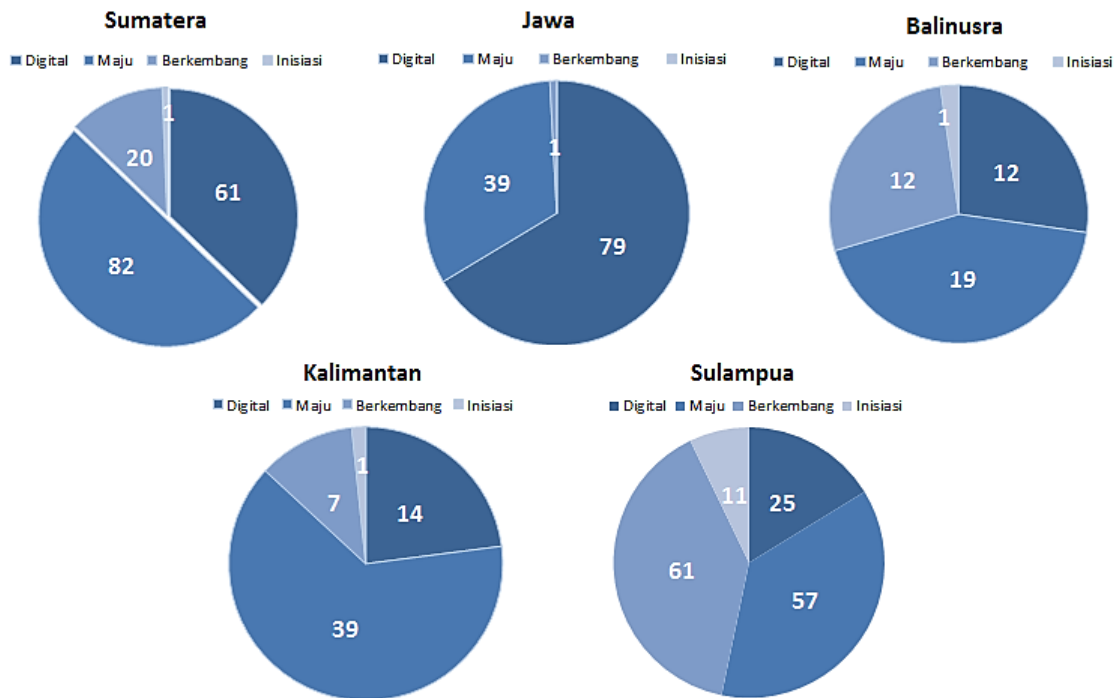
Dari 191 pemerintah daerah yang berada di Tahap Digital, sebagian besar berada di wilayah Jawa sebanyak 79 pemerintah daerah, disusul oleh Sumatera sebanyak 61 pemerintah daerah, Sulampua sebanyak 25 pemerintah daerah, Kalimantan sebanyak 14 pemerintah daerah, dan Balinusra sebanyak 12 pemerintah daerah.

Sedangkan, Tahap Maju sebanyak 236 pemerintah daerah tersebar di wilayah Sumatera sebanyak 82 pemerintah daerah, disusul oleh Sulampua sebanyak 57 pemerintah daerah, Jawa sebanyak 39 pemerintah daerah, Kalimantan sebanyak 39 pemerintah daerah dan Balinusra sebanyak 19 pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang berada di Tahap Berkembang didominasi dari Sulampua sebanyak 61 pemerintah daerah, Sumatera sebanyak 20 pemerintah daerah, Balinusra sebanyak 12 pemerintah daerah, Kalimantan sebanyak 7 pemerintah daerah dan Jawa sebanyak 1 pemerintah daerah.

Sementara Pemerintah daerah yang masih berada di Tahap Inisiasi sebanyak 14 pemerintah daerah sebagian besar berasal dari Sulampua sebanyak 11 pemerintah daerah dan sisanya berasal dari wilayah Sumatera, Balinusra dan Kalimantan masing-masing sebanyak 1 (satu) pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah di tingkat inisiasi berada di wilayah kepulauan dan pegunungan, salah satunya Kabupaten Lanny Jaya sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan sistem pembayaran nontunai.

Grafik 3.2. Tahapan Elektronifikasi Per Wilayah



Sumber: Bank Indonesia

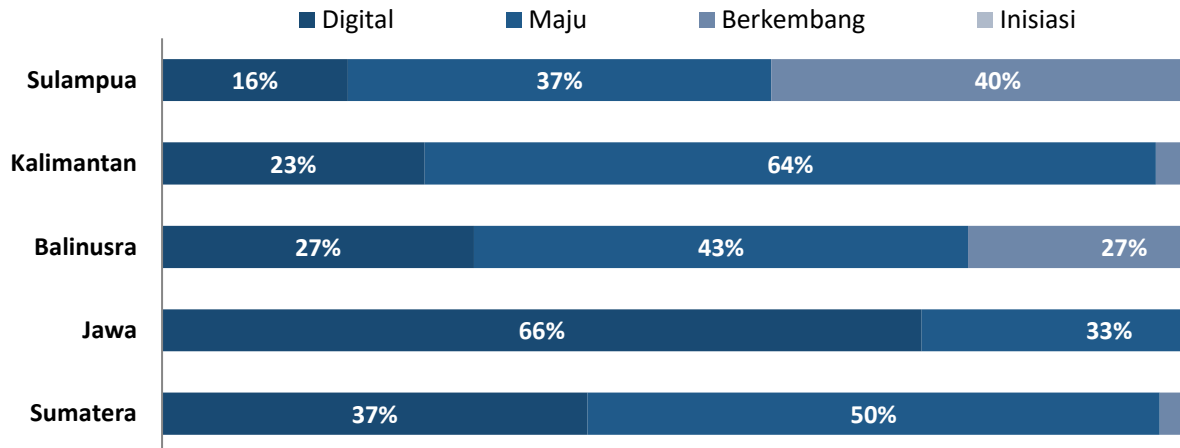
Sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Jawa atau 66% sudah berada di tahap Digital, di tahap Maju sebanyak 33%, dan tahap Berkembang sebanyak 1% dari total 119 pemerintah daerah serta tidak terdapat pemerintah daerah di Wilayah Jawa yang termasuk dalam tahap Inisiasi (Grafik 3.3).

Pemerintah daerah di Kalimantan, Sumatera dan Balinusra sebagian besar berada di tahap Maju. Wilayah Kalimantan memiliki pemerintah daerah di tahap Maju sebanyak 64%, di tahap Digital mencapai 23%, tahap Berkembang sebanyak 11% dan tahap Inisiasi sebanyak 2% dari total 61 pemerintah daerah. Wilayah Sumatera memiliki pemerintah daerah di tahap Maju sebanyak 50%, di tahap Digital mencapai 37%, di tahap Berkembang sebanyak 12% dan tahap Inisiasi sebanyak 1% dari total 164 pemerintah daerah. Wilayah Balinusra memiliki pemerintah daerah di tahap Maju sebanyak 43%, di tahap Digital mencapai 27%, di tahap Berkembang sebanyak 27% dan tahap Inisiasi sebanyak 2% dari total 44 pemerintah daerah (Grafik 3.3).

Pemerintah daerah di Wilayah Sulampua sebagian besar masih berada di tahap Berkembang 40%, di tahap Maju sebanyak 37%, di tahap Digital 16% dan tahap Inisiasi sebanyak 7% dari total 154 pemerintah daerah (Grafik 3.3). Dengan demikian, perlu

adanya dorongan dalam melakukan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terutama dalam transaksi pendapatan daerah.

Grafik 3.3. Capaian Implementasi ETPD per Wilayah



Sumber: Bank Indonesia

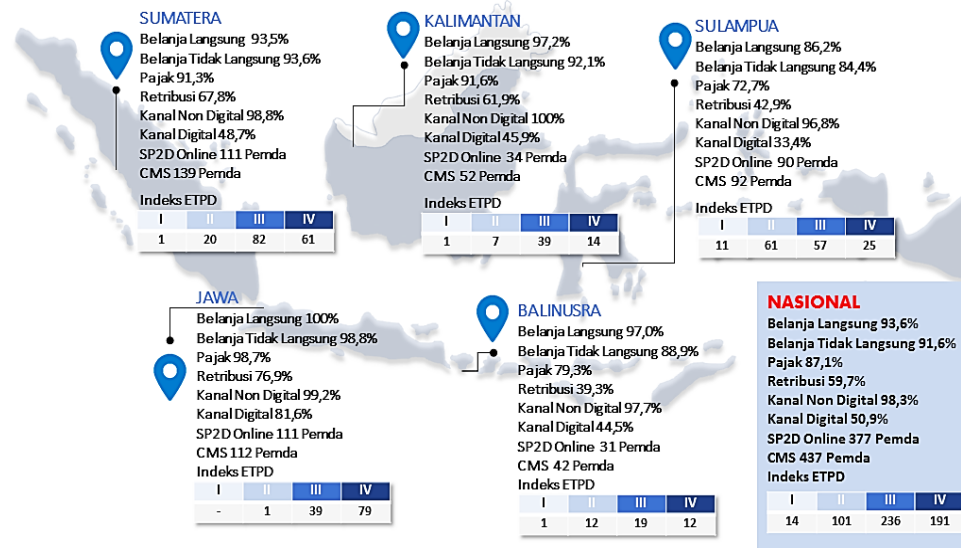
5.3. Implementasi IETPD Semester II Tahun 2021

Capaian elektronifikasi transaksi pembayaran pajak pada semester II tahun 2021 secara nasional sebesar 87,1% dari pajak yang dipungut, sedangkan elektronifikasi transaksi pembayaran retribusi mencapai 59,7% dari retribusi yang dipungut. Gambar 3.3 menunjukkan capaian elektronifikasi pajak tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 98,7% dari pajak yang dipungut, disusul oleh wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 91,6%, wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 91,3%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 79,3%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 72,7% dari pajak yang dipungut. Sementara itu, capaian elektronifikasi retribusi tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 76,9% dari retribusi yang dipungut, disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 67,8%, wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 61,9%, wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 42,9%, dan wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 39,3% dari retribusi yang dipungut.

Elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung pada semester II 2021 secara nasional mencapai 91,6%, sedangkan elektronifikasi transaksi belanja langsung secara nasional mencapai 93,6%. Gambar 3.3 menunjukkan capaian elektronifikasi belanja tidak langsung tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 98,8% dari seluruh jenis belanja tidak langsung yang dianggarkan, disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 93,6%, wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 92,1%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 88,9%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 84,4% dari seluruh jenis belanja tidak langsung yang dianggarkan. Sementara itu, capaian elektronifikasi belanja langsung tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebesar 100,0%

dari seluruh jenis belanja langsung yang dianggarkan, disusul oleh wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 97,2%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 97,0%, wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 93,5%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 86,2% dari seluruh jenis belanja langsung yang dianggarkan.

Gambar 3.3. Disagregasi IETPD Per Wilayah



Sumber: Bank Indonesia

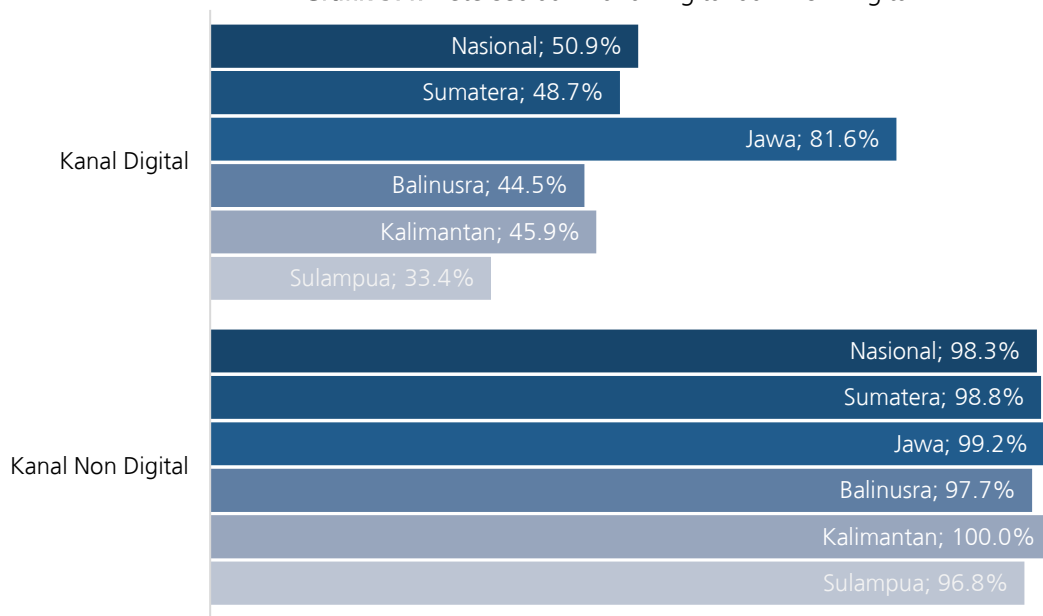
Penggunaan kanal pembayaran non digital (loket bank atau *teller*) pada semester II tahun 2021 secara nasional mencapai 98,3% dari total 542 pemerintah daerah. Grafik 3.4 menunjukkan wilayah Kalimantan memiliki capaian penggunaan kanal non digital tertinggi dengan capaian pada semester II 2021 sebesar 100%. Capaian tersebut, disusul oleh wilayah Jawa dengan capaian pada semester II 2021 sebesar 99,2%, wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 98,8%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 97,7%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 96,8%.

Sementara, penggunaan kanal pembayaran digital (QRIS, ATM, EDC, Agen Bank, *Mobile/Internet/SMS Banking*, *UE Reader*, dan *e-commerce*) oleh pemerintah daerah di wilayah lainnya masih relatif kecil sebesar 50,9%. Capaian penggunaan kanal pembayaran digital tertinggi terdapat di wilayah Jawa sebesar 81,6%. Capaian tersebut, disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebesar 48,7%, wilayah Kalimantan dengan capaian sebesar 45,9%, wilayah Balinusra dengan capaian sebesar 44,5%, dan wilayah Sulampua dengan capaian sebesar 33,4% (Grafik 3.4).

Capaian tersebut menunjukkan penggunaan kanal pembayaran digital, terutama mesin EDC, QRIS, dan *e-commerce* masih perlu didorong terutama pada wilayah

Sulampua untuk meningkatkan efisiensi pembayaran transaksi penerimaan PAD terutama pembayaran transaksi pajak dan retribusi.

Grafik 3.4. Ketersediaan Kanal Digital dan Non-Digital



Sumber: Bank Indonesia

Penggunaan SP2D online di semester II tahun 2021 secara nasional telah dilakukan oleh 377 pemerintah daerah (69,6%). Pada tabel 3.1, penggunaan SP2D Online tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebanyak 111 pemerintah daerah (93,3%), disusul oleh wilayah Balinusra dengan capaian sebanyak 31 pemerintah daerah (70,5%), wilayah Sumatera dengan capaian sebanyak 111 pemerintah daerah (67,7%), wilayah Sulampua dengan capaian sebanyak 90 pemerintah daerah (58,4%) dan wilayah Kalimantan dengan capaian sebanyak 34 pemerintah daerah (55,7%).

Cash Management System (CMS) pada semester II tahun 2021 secara nasional telah diimplementasikan di 437 pemerintah daerah (80,6%). Capaian Implementasi CMS tertinggi terdapat di wilayah Balinusra, yaitu sebanyak 42 pemerintah daerah (95,5%), disusul oleh wilayah Jawa dengan capaian sebanyak 112 pemerintah daerah (94,1%), wilayah Kalimantan dengan capaian sebanyak 52 pemerintah daerah (85,2%), wilayah Sumatera dengan capaian sebanyak 139 pemerintah daerah (84,8%) dan wilayah Sulampua dengan capaian sebanyak 92 pemerintah daerah (59,7%).

Sementara itu, **Integrasi antara CMS dan sistem keuangan pemda** pada semester II 2021 telah mencapai 343 pemerintah daerah (63,3%). Capaian integrasi CMS tertinggi terdapat di wilayah Jawa, yaitu sebanyak 89 pemerintah daerah (74,8%), disusul oleh wilayah Sumatera dengan capaian sebanyak 109 pemerintah daerah (66,5%), wilayah Balinusra dengan capaian sebanyak 27 pemerintah daerah (61,4%), wilayah Kalimantan

dengan capaian sebanyak 36 pemerintah daerah (59,0%) dan wilayah Sulampua dengan capaian sebanyak 82 pemerintah daerah (53,2%).

Tabel 3.1. Ketersediaan SP2D Online dan CMS di Wilayah Pemda

Sistem Keuangan	Nasional	Sumatera	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Sulampua
SP2D Online	377 Pemda (69,5%)	111 Pemda (67,7%)	111 Pemda (93,3%)	31 Pemda (70,5%)	34 Pemda (55,7%)	90 Pemda (58,4%)
CMS	437 Pemda (80,6%)	139 Pemda (84,8%)	112 Pemda (94,1%)	42 Pemda (95,5%)	52 Pemda (85,2%)	92 Pemda (59,7%)
Integrasi CMS	343 Pemda (63,3%)	109 Pemda (66,5%)	89 Pemda (74,8%)	27 Pemda (61,4%)	36 Pemda (59,0%)	82 Pemda (53,2%)
Jumlah Pemda	542 Pemda	164 Pemda	119 Pemda	44 Pemda	61 Pemda	154 Pemda

Sumber: Bank Indonesia

Hasil pemetaan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur menunjukkan adanya ketidakmerataan ketersediaan jaringan terutama jaringan 4G. Berdasarkan hasil pemetaan, wilayah Sumatera memiliki ketersediaan jaringan 4G yang paling tinggi, sebanyak 88 pemerintah daerah dengan cakupan 76% - 100% kecamatan / desa di wilayahnya sudah tercover 4G (Tabel 3.2). Capaian tersebut, disusul oleh wilayah Jawa sebanyak 87 pemerintah daerah. Sementara itu, wilayah Sulampua memiliki ketersediaan jaringan 4G yang relatif kecil dan tidak merata, hal ini menunjukkan bahwa wilayah Sulampua memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan dan perluasan jaringan 4G terutama pada 17 pemerintah daerah yang kecamatan / desa yang hanya mencakup 1% - 25% jaringan 4G.

Tabel 3.2. Cakupan Layanan 4G di wilayah Pemda

Ketersediaan Jaringan 4G	Sumatera	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Sulampua
1% s.d 25%	8	3	3	6	17
26% s.d 50%	17	7	8	11	28
51% s.d 75%	51	22	18	21	55
76% s.d 100%	88	87	15	23	53
Belum Ada	-	-	-	-	1
Total	164	119	44	61	154

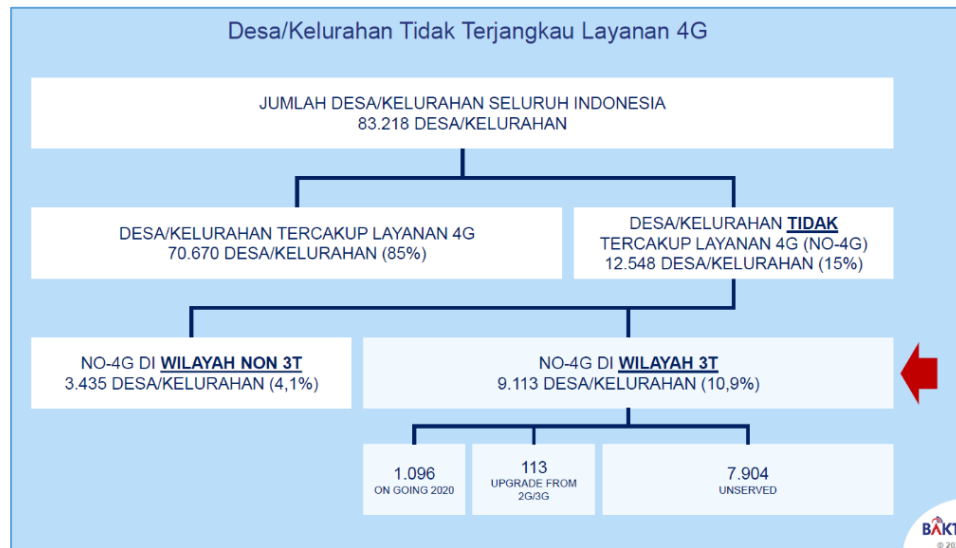
Sumber: Bank Indonesia

Hal ini sejalan dengan informasi dari Kemenkominfo – BAKTI bahwa secara nasional daerah yang tercakup dengan layanan 4G sebanyak 70.670 desa/kelurahan atau 85% dari 83.218 desa/kelurahan. Sedangkan, wilayah lainnya belum tercakup dengan layanan 4G (non-4G) sebanyak 12.548 desa/kelurahan terdiri atas wilayah Non 3T

sebanyak 3.435 desa/kelurahan dan wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) sebanyak 9.113 desa/kelurahan masuk kedalam wilayah 3T.

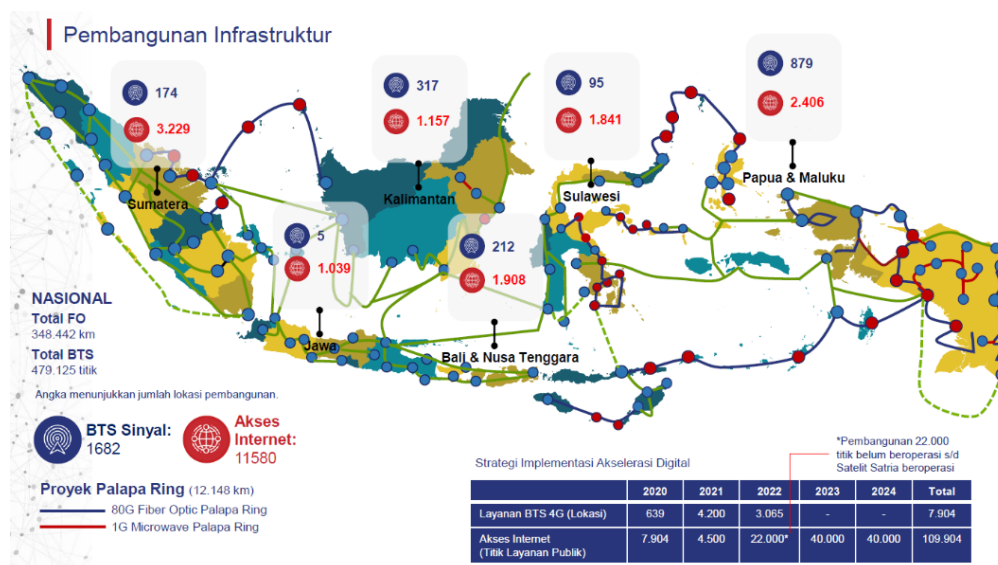
Dalam tahapannya pengembangan infrastruktur akan terus dilakukan dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kominfo – BAKTI dengan estimasi pembangunan layanan BTS 4G (lokasi) pada tahun 2022 sebanyak 3.065 BTS, dengan pembangunan akses internet (titik layanan publik) tahun 2022 sebanyak 22.000 titik s.d satelit Satria beroperasi.

Gambar 3.4. Penyebaran Layanan Jaringan 4G



Sumber: BAKTI - Kemenkominfo

Gambar 3.5. Pembangunan Infrastruktur

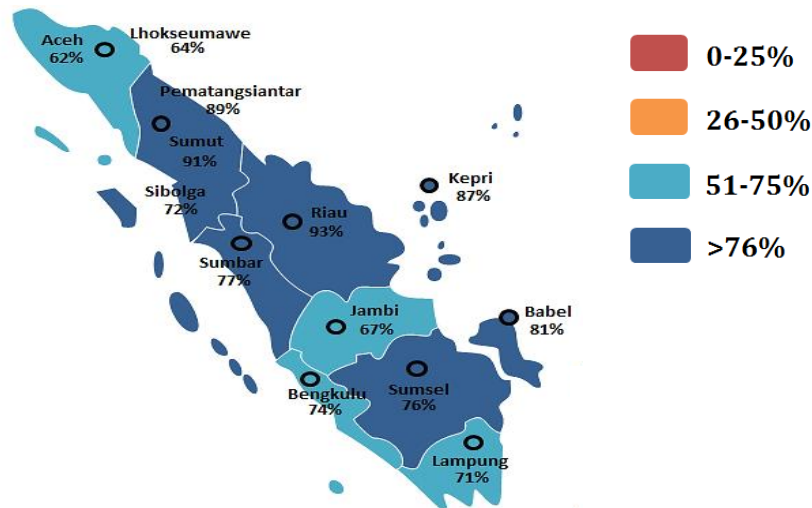


Sumber: BAKTI - Kemenkominfo

5.4. Implementasi ETP Berdasarkan Regional

5.4.1. Sumatera

Gambar 3.6. Mapping Implementasi ETPD - Sumatera



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan seluruh pemda di wilayah Sumatera, terdapat 6 provinsi yang rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berada pada level >76%, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan sedangkan 4 provinsi lainnya memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD pemda sekitar 51-75%, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung (Gambar 3.6).

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 134 pemerintah daerah atau 81,7% dari total 164 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada

Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kota Batam – Kepulauan Riau

Kota Batam telah melakukan implementasi ETPD Integrasi pembayaran pajak hotel dan restoran melalui mesin *tapping box* bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, pelaksanaan lelang elektronik hingga penerapan QRIS untuk transaksi pembayaran Trans Batam. Akselerasi elektronifikasi di Pemda Kota Batam dapat terlihat dari peningkatan tahapan IETPD Pemda dari Tahap Berkembang pada di awal tahun 2021, meningkat Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi pendapatan daerah (pajak dan retribusi) dan belanja daerah (belanja langsung dan tidak langsung). Selain itu, Kota Batam juga telah berhasil mengimplementasikan SP2D Online dan CMS serta mengintegrasikannya.

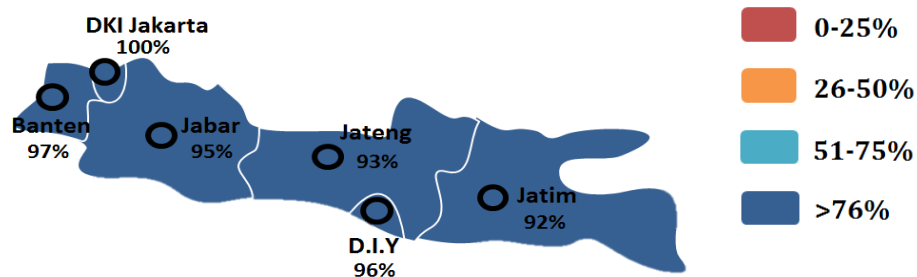
seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 82 pemda atau 50,0% total 164 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce*, dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 111 pemerintah daerah (67,7%) telah menggunakan *SP2D Online*, 139 pemerintah daerah (84,8%) telah memiliki CMS, serta 109 pemerintah daerah (66,5%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda.

Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Sumatera sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada sebanyak 132 atau 80,5% dari total 164 pemerintah daerah.

5.4.2. Jawa

Gambar 3.7. Mapping Implementasi ETP - Jawa



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD baik dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan, seluruh pemda di wilayah Jawa memiliki rata-rata implementasi ETPD yang sangat baik dan merata (>76%) (Gambar 3.7). Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pemda di wilayah Jawa telah melakukan implementasi elektronifikasi pada transaksi belanja maupun pendapatan daerah secara optimal.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 114 pemerintah daerah atau 95,8% dari total 119 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 58 pemda atau 48,7% total 119 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce*, dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 111 pemerintah daerah (93,3%) telah menggunakan SP2D *Online*, 112 pemerintah daerah (94,1%) telah memiliki CMS, serta 89 pemerintah daerah (74,8%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda *online*.

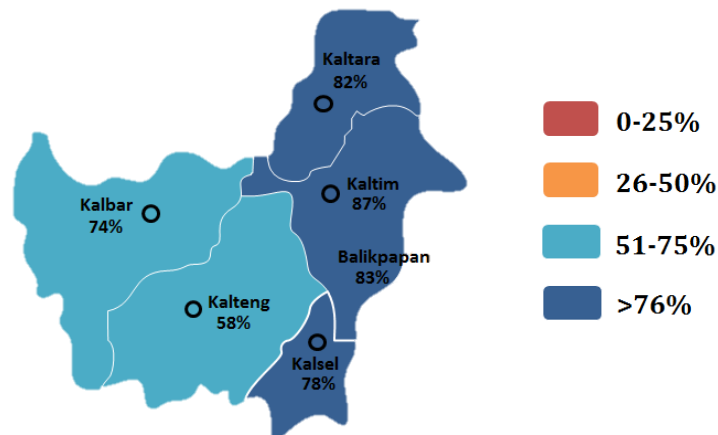
Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 114 atau 95,8% dari total 119 pemerintah daerah.

Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kab. Pandeglang - Banten

Kabupaten Pandeglang berhasil meningkatkan tahapan elektronifikasi Pemda dari Berkembang di awal tahun 2021, menjadi Maju pada pertengahan tahun 2021 kemudian menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut, didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi Pajak, Retribusi, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selain itu, Kabupaten Pandeglang juga telah berhasil mengimplementasikan seluruh kanal pembayaran non digital (Teller/LoketBank) dan kanal digital (ATM, EDC, *Mobile/Internet/SMS Banking*, uang elektronik dan platform digital lainnya). Hal tersebut dapat dicapai oleh berbagai inovasi yang telah dilakukan, salah satunya implementasi QRIS pada Puskesmas.

5.4.3. Kalimantan

Gambar 3.8. Mapping Implementasi ETP - Kalimantan



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan seluruh pemda di wilayah Kalimantan, terdapat 3 provinsi yang rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berada pada level >76%, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Gambar 3.8). Sementara itu, 2 provinsi lainnya memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD berkisar 51-75%, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 52 pemerintah daerah atau 85,2% dari total 61 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 25 pemerintah daerah atau 41,0% total 61 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce* dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 34 pemerintah daerah (55,7%) telah menggunakan *SP2D Online*, 52 pemerintah daerah (85,2%) telah memiliki CMS, serta 36 pemerintah daerah (59,0%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online.

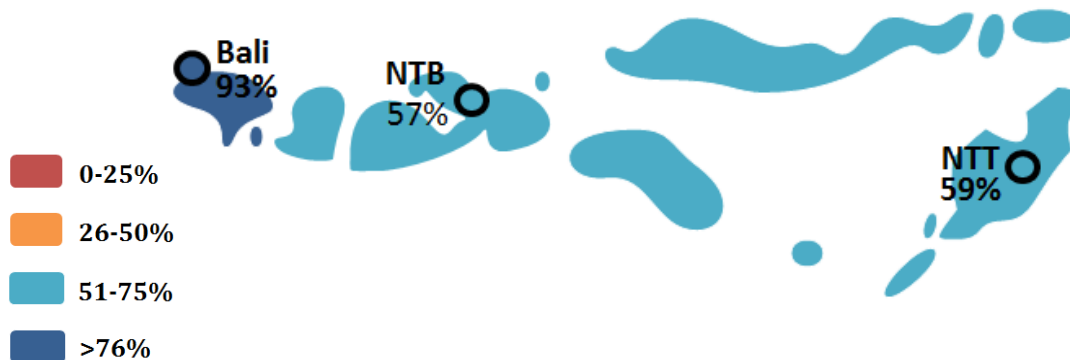
Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 53 atau 70,5% dari total 61 pemerintah daerah.

Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kota Tarakan – Kalimantan Utara

Kota Tarakan berhasil meningkatkan tahapan elektronifikasi dari Maju pada awal tahun 2021 menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Salah satu upaya implementasi ETPD dilakukan melalui inovasi pada transaksi pembayaran PBB secara online dan pembayaran retribusi parkir melalui uang elektronik. Kota Tarakan juga telah menyediakan seluruh kanal pembayaran non digital dan kanal digital terutama QRIS. Dalam mendukung implementasi ETPD, Kota Tarakan juga telah melakukan integrasi antara CMS dengan *SP2D Online*.

5.4.4. Balinusra

Gambar 3.9. Mapping Implementasi ETP - Balinusra



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan seluruh pemda di wilayah Balinusra, terdapat 1 provinsi yang rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berada pada level >76%, yaitu Provinsi Bali (Gambar 3.9). Sementara itu, 2 provinsi lainnya memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD pemda di dalamnya berkisar 51-75%, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 34 pemerintah daerah atau 77,3% dari total 44 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 8 pemerintah daerah atau 18,2% total 44 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce* dan *Teller/Loket Bank*.

Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Provinsi Bali

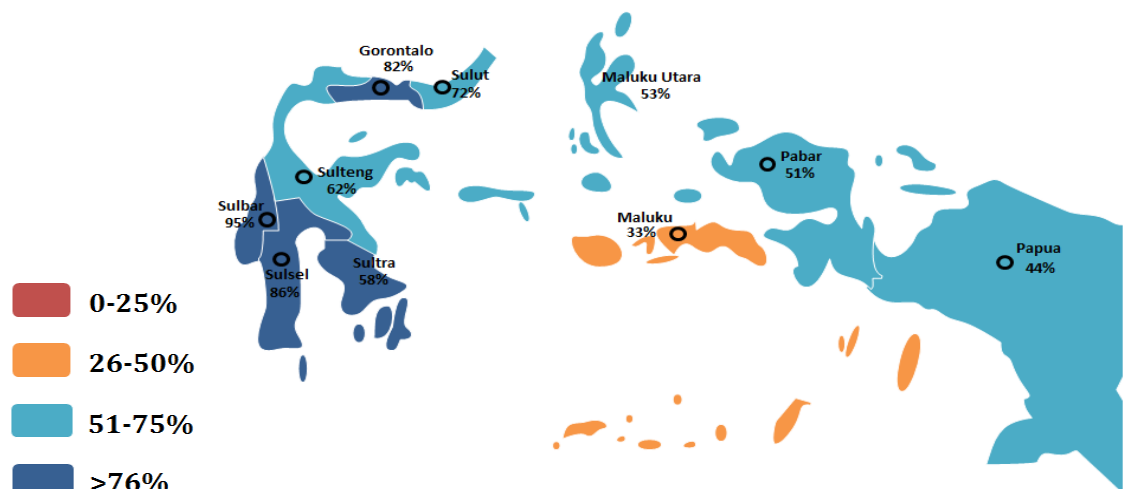
Provinsi Bali berhasil meningkatkan indeks ETPD yang semula pada tahap Maju pada awal tahun 2021 menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut, didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi pendapatan daerah (pajak dan retribusi) dan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Selain itu, Provinsi Bali juga berhasil menggunakan kanal pembayaran non digital (teller/loket bank) dan meningkatkan penggunaan kanal digital pada akhir tahun 2021. Peran aktif bank daerah dalam mengintegrasikan layanan non tunai pada berbagai destinasi wisata juga menjadi faktor pendorong keberhasilan elektronifikasi di Provinsi Bali.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda *online* sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 31 pemerintah daerah (70,5%) telah menggunakan SP2D *Online*, 42 pemerintah daerah (95,5%) telah memiliki CMS, serta 27 pemerintah daerah (61,4%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda *online*.

Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 31 atau 70,5% dari total 44 pemerintah daerah.

5.4.5. Sulampua

Gambar 3.10. Mapping Implementasi ETP - Sulampua



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan hasil implementasi ETPD dari sisi elektronifikasi Belanja maupun pendapatan, pemerintah daerah di wilayah Sulampua memiliki implementasi ETPD yang lebih granular, terdapat 4 provinsi yang memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD berada pada level >76%, yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 3.10). Selain itu, sebanyak 5 provinsi yang memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD pemda berada pada level 51-75%, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Sementara, Provinsi Maluku memiliki rata-rata indeks implementasi ETPD berada pada level 26-50%.

Dari hasil asesmen ETPD, sebanyak 105 pemerintah daerah atau 68,2% dari total 154 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh

transaksi belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran. Dari sisi pendapatan, sebanyak 47 pemerintah daerah atau 30,5% total 154 pemerintah daerah telah mengimplementasikan elektronifikasi pada seluruh transaksi pajak dan retribusi dari masyarakat antara lain dengan menggunakan QRIS, ATM, EDC, *Internet/Mobile/SMS Banking*, *UE Reader*, *ecommerce* dan *Teller/Loket Bank*.

Untuk mendukung elektronifikasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dibutuhkan kesiapan infrastruktur IT, salah satunya dengan mengintegrasikan antara CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan pemda dapat dilakukan secara digital. Sebanyak 90 pemerintah daerah (58,4%) telah menggunakan SP2D *Online*, 92 pemerintah daerah (59,7%) telah memiliki CMS, serta 82 pemerintah daerah (53,2%) telah mengintegrasikan CMS dengan Sistem Keuangan Pemda online.

Dalam rangka mendorong literasi masyarakat, pemda di wilayah Jawa sudah melakukan sosialisasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan *awareness* kepada masyarakat. Adapun jumlah pemda yang telah melakukan sosialisasi pada Semester II 2021 sebanyak 89 pemerintah daerah atau 57,8% dari total 154 pemerintah daerah.

Keberhasilan Elektronifikasi Pemda Kab. Pinrang – Sulawesi Selatan

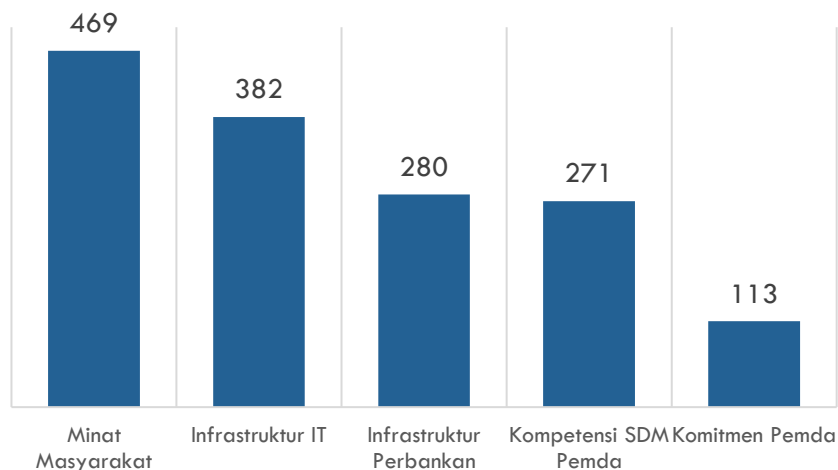
Kabupaten Pinrang berhasil meningkatkan indeks ETPD dari berkembang pada awal tahun 2021 menjadi Digital pada akhir tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh implementasi elektronifikasi pada seluruh jenis transaksi pajak dan retribusi serta penggunaan kanal pembayaran non digital (*Teller/Loket Bank*) dan kanal digital. Dari sisi transaksi belanja, Kabupaten Pinrang telah melakukan elektronifikasi pada Selain itu, Kabupaten Pinrang juga telah berhasil mengintegrasikan CMS dengan SP2D online serta melakukan berbagai inovasi implementasi metode pembayaran non tunai terutama kanal QRIS menjadi faktor pendorong elektronifikasi pemda.

6. BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI

6.1. Kendala Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Minat masyarakat dan infrastruktur IT menjadi kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam mendorong ETPD. Sebanyak 469 pemerintah daerah melaporkan bahwa minat masyarakat dalam memanfaatkan kanal-kanal nontunai dalam transaksi pembayaran pajak dan retribusi masih perlu didorong. Selain itu, infrastruktur IT untuk mendorong digitalisasi daerah yang belum merata juga menjadi kendala bagi 382 pemerintah daerah. Adapun kendala tersebut berupa jangkauan layanan telekomunikasi dan internet, terutama di daerah terpencil. Kendala lainnya berupa ketersediaan infrastruktur perbankan di daerah di 280 pemerintah daerah, kompetensi SDM pemerintah daerah di 271 pemerintah daerah, serta komitmen pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan di 113 pemerintah daerah (Grafik 6.1).

Grafik 6.1. Pemetaan Kendala



Sumber: Bank Indonesia

Kendala terbesar yang dihadapi pemerintah daerah di wilayah Jawa adalah minimnya minat masyarakat bertransaksi nontunai sebanyak 105 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 52 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 43 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 38 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 14 pemerintah daerah (Tabel 6.1). Kalimantan juga memiliki kendala terbesar berasal dari minimnya minat masyarakat bertransaksi

nontunai sebanyak 53 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 46 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 45 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 31 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 8 pemerintah daerah. Mayoritas pemerintah daerah di wilayah Balinusra juga memiliki kendala minimnya minat masyarakat bertransaksi nontunai sebanyak 42 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 36 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 33 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 24 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 15 pemerintah daerah.

Tabel 6.1. Kendala Pemerintah daerah Dalam Mendorong ETPD di Daerah (pemerintah daerah)

No	Wilayah	Total	Minat Masyarakat	Infrastruktur IT	Infrastruktur Perbankan	Kompetensi SDM	Komitmen
1	Jawa	119	105	52	38	43	14
	Provinsi	6	4	0	2	0	0
	Kota	29	23	4	5	8	4
	Kabupaten	84	78	48	31	35	10
2	Sumatera	164	146	114	87	69	28
	Provinsi	10	9	6	6	2	1
	Kota	34	30	18	15	12	7
	Kabupaten	120	107	90	66	55	20
3	Kalimantan	61	53	46	45	31	8
	Provinsi	5	4	4	2	1	1
	Kota	9	8	4	7	5	2
	Kabupaten	47	41	38	36	25	5
4	Sulampua	154	123	134	86	95	48
	Provinsi	10	7	8	6	6	4
	Kota	17	16	11	9	12	5
	Kabupaten	127	100	115	71	77	39
5	Balinusra	44	42	36	24	33	15
	Provinsi	3	3	1	2	2	1
	Kota	4	4	2	2	2	1
	Kabupaten	37	35	33	20	29	13
6	Nasional	542	469	382	280	271	113
	Provinsi	34	27	19	18	11	7
	Kota	93	81	39	38	39	19
	Kabupaten	415	361	324	224	221	87

Sumber: Bank Indonesia

Di wilayah Sumatera, kendala terbesar yang dihadapi yakni minimnya minat masyarakat bertransaksi nontunai sebanyak 146 pemerintah daerah, infrastruktur IT sebanyak 114 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 87 pemerintah

daerah, kompetensi SDM sebanyak 69 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 28 pemerintah daerah. Sementara itu, di wilayah Sulampua memiliki pemerintah daerah yang sebagian besar menghadapi kendala pada minimnya infrastruktur IT sebanyak 134 pemerintah daerah, disusul dengan minat masyarakat sebanyak 123 pemerintah daerah, kompetensi SDM sebanyak 95 pemerintah daerah, infrastruktur perbankan sebanyak 86 pemerintah daerah, dan komitmen pemerintah daerah sebanyak 48 pemerintah daerah (Tabel 6.1).

6.2. Rekomendasi Dalam Mendorong Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dalam rangka mempersiapkan ekosistem digital untuk mendorong perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, perlu adanya koordinasi dan fasilitasi peningkatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara bersama-sama baik di tingkat pusat maupun daerah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. **Melaksanakan edukasi dan sosialisasi** dalam meningkatkan literasi dan minat masyarakat untuk bertransaksi nontunai khususnya dengan menggunakan kanal pembayaran digital seperti QRIS, *e-commerce*, dan *internet/mobile banking*.
- b. **Mendorong kesiapan infrastruktur jaringan IT** melalui koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Komunikasi dan Informasi di masing-masing pemerintah daerah.
- c. **Mendorong sosialisasi kepada Pemda** untuk meningkatkan partisipasi dan keakurasian pelaporan implementasi ETPD dalam SIP2DD.
- d. **Mendorong perluasan ETPD** terutama dengan menggunakan kanal pembayaran digital, termasuk mendorong kesiapan BPD untuk bekerjasama dengan bank lain/PJP atau platform digital/*ecommerce*.
- e. **Meningkatkan komitmen koordinasi** antara pemerintah daerah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) melalui TP2DD untuk mendorong peningkatan indeks ETPD sebagai salah satu factor dalam penilaian *championship* TP2DD secara nasional.

TIM PENYUSUN

Penasihat:

Rahmat Hernowo

A. Donanto H.W.

Koordinator:

Sithowati Sandrarini

Ketua Tim Penyusun:

Duddy Adiyatna

Tim Penyusun:

Freddy Firmansyah

Meita Elshinta Siagian

Novan Permana

Rully Farel

Choirunnisa Rifa Juliani

Jonatan Kristian Muda

Priskila Teresa Nandita

Kontributor:

542 Pemerintah Daerah

46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia